

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Badan. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*.
- Arisandi, Y. (2015). Pengaruh penambahan wajib pajak badan, penyampaian SPT Masa PPh Badan, penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jom FEKON*.
- Fadjillah, M. R., & Andi. (2016). kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Tigaraksa. *Jurnal Riset akuntansi terpadu*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Bulaksumur: Penerbit Andi.
- Marismiati, & Nurrahmah, H. (2017). Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Majalaya. *Poltekpos Bandung*.
- Maulida, C. I., & Adnan. (2017). pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Banda Aceh. *JIMEKA*.
- Meidhawati, I., Andi, & Susanto, D. (2019). Pengaruh pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Serang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Migang, S., & Dirmayani, R. D. (2017). pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Badan pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Mispa, S. (2019). pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*.
- Nuraini, F. (2017). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kerumitan, dan persepsi kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan E-Filling bagi wajib pajak Orang Pribadi di Kota Kudus. *Buletin Ekonomi*.

- Oktaviani, D., & Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah wajib pajak Orang Pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi. *Ultima Accounting*.
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2018). analisis kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*.
- Prihastani, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. *Accounting Analysis Journal*.
- Putra, R. D., & Hapsari, D. W. (2015). Pengaruh pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25. *e-Proceeding of Management*.
- Putri, O. M., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di KPP Madya Bandung. *e-Proceeding of Management*.
- Putriani, I. N. (2016). Pengaruh penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus pada penerimaan pajak penghasilan badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahman, F. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Makassar Utara. *Economix*.
- Rahman, O. (2017). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sunset Policy Jilid II terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru. *JOM Fekon*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rubainah, Mujairimi, & Zakhra, A. (2019). Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pengawasan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *SINEMA*.
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. (2019). *Pengantar Perpajakan (Cara meningkatkan Kepatuhan Pajak)*. Jakarta: Indeks.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business (A Skill Building Approach Seventh Edition)*. New Jersey: Wiley.
- Setiawati, A. (2017). pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *JOM Fekon*.
- Wahda, N. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

SUMBER PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan III
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 Tentang Penetapan Hari Pajak Direktur Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tatacara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tatacara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindehan Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang
Tatacara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/Pmk.03/2013 Tentang Tatacara Pemeriksaan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar
Pemeriksaan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2013 Tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Ketentuan Umum Dan Tatacara
Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

SUMBER WEBISTE

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pemeriksaan Pajak*. Retrieved from pajak.go.id:
<https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan>

Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2016>

Kementerian Keuangan. (2017). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2017>

Kementerian Keuangan. (2018). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2018>

- Kementrian Keuangan. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019*. Retrieved from Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019>
- Lathifa, D. (2019, Oktober 19). *Mengenal 5 Jenis Surat Ketetapan Pajak dan Fungsinya*. Retrieved from online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/5-jenis-surat-ketetapan-pajak#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20SKP%20berfungsi,administrasi%20perpajakan%2C%20serta%20menagih%20pajak>.
- Loeb, S. (2019, Agustus 26). *Perang dagang AS vs China, apa dampaknya bagi Indonesia?* Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/perang-dagang-as-vs-china-apa-dampaknya-bagi-indonesia-1rjrxgKV8KQ>
- Muchlis, C. A. (2019, Maret 22). *Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajak*. Retrieved from nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-yang-harus-dilakukan-otoritas-pajak>
- Resha. (2019, Februari 25). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. Retrieved from Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>